

**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP
PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE***

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang)



Skripsi Oleh:

DESYA RAHAYU

01031181419066

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
(*Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang*)

Disusun Oleh :

Nama : Desya Rahayu
NIM : 01031181419066
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian / Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Tanggal Dosen Pembimbing
Ketua


: 10 Agustus 2018


Drs. Harun Delamat, M.Si., Ak

NIP : 195501131990031002

Tanggal Anggota

: 28 Agustus 2018


Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

NIP : 196905251996032001

PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*




(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang)

Disusun Oleh :

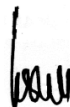
Nama : Desya Rahayu
NIM : 01031181419066
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian / Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 17 Oktober 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 19 Oktober 2018

No	Nama	Tanda Tangan
1	Drs. Harun Delamat, M.Si., Ak NIP : 195501131990031002	
2	Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak NIP : 196905251996032001	
3	Abukosim, S.E., Ak., M.M NIP : 196205071995121001	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, SE., M.Acc, Ak, CA
NIP : 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desya Rahayu
NIM : 01031181419066
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
(SPIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE***

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang)

Pembimbing:

Ketua : Drs. Harun Delamat, M.Si., Ak
Anggota 1 : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
Anggota 2 : Abukosim, S.E., Ak., M.M
Tanggal Ujian : 17 Oktober 2018

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya,
Pembuat Pernyataan

Desya Rahayu
NIM. 01031181419066



MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.”

(Al-Insyirah: 5-8)

Skripsi ini saya persembahkan kepada

- Sang maha pencipta dunia & akhirat (Allah SWT.)
- Papa & Mama tercinta
- Para Dosen Fakultas Ekonomi Unsri
- Saudara– saudaraku tercinta
- Sahabat – sahabat tersayang
- Rekan–rekan seperjuangan
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang)**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan *Good Governance* pada SKPD Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Maka daripada itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff., MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwah, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Pak Arista Hakiki, SE., M.Acc., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Pembimbing Akademik.
4. Bu Umi Kalsum, SE., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
5. Bapak Drs. Harun Delamat, M.Si., Ak selaku Pembimbing Skripsi 1 dan Bu Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak selaku Pembimbing Skripsi 2 saya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing sarta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Mama, Papa, Kakak, Ibu (Nenek), dan semua keluarga yang senantiasa selalu mendoakan serta mendukung selama dari awal proses perkuliahan sampai dengan sidang akhir.
7. Minion-minionku (Tria, Winda, Hafshah) yang selalu ada baik suka maupun duka, tempat berbagi cerita, canda dan tawa mulai dari awal sekolah menengah pertama sampai sekarang.
8. EGAP Family, keluarga baru yang saya temukan ketika menginjak dunia perkuliahan. Merasakan manis dan pahitnya dunia perkuliahan bersama-sama. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua.
9. Gumilar Adhitya Darmawan, teman dekat sekaligus sahabat yang selalu memberikan semangat dan selalu ada sebagai tempat untuk mendengarkan keluh kesah dan juga cerita bahagia.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dengan tulus dan ikhlas membantu dan mendoakan keberhasilan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Palembang, 19 Oktober 2018



Desya Rahayu
NIM 01031181419066

ABSTRAK

PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang)

Oleh :

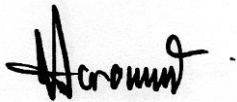
Desya Rahayu;
Drs. Harun Delamat, M.Si., Ak;
Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji bagaimana pengaruh kinerja aparatur pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *good governance*. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Analisis yang digunakan adalah *regresi berganda* dan uji t untuk melihat pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *good governance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan penerapan *good governance*. 2) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good governance*. 3) Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Kata kunci : *Good Governance*, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, SPIP

Telah kami setujui untuk ditempatkan pada lembar skripsi.

Ketua,



Drs. Harun Delamat, M.Si., Ak
NIP: 195501131990031002

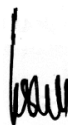
Palembang, Oktober 2018

Anggota,



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP: 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP: 197303171997031002

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS, FINANCIAL MANAGEMENT AND THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE OF PALEMBANG LOCAL GOVERNMENT

By :

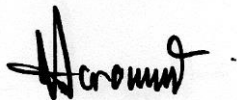
**Desya Rahayu;
Drs. Harun Delamat, M.Si., Ak;
Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak**

This study aims to identify and examine how the effect of the performance of local government officials, financial management and the government's internal control system (SPIP) on the implementation of good governance. This study is classified causative research. The population in this study is the Palembang local government. The selection of the sample used purposive sampling methods. Data of this study is primary data. Statistic analysis used multiple regression to test the impact of performance of local government officials, financial management and internal control system of government (SPIP) on the implementation of good governance. The results provided empirical evidences that: 1) Performance of local government officials has positive significant effect on the implementation of good governance. 2) financial management has positive significant effect on the implementation of good governance. 3) The system of internal control government (SPIP) has positive but no significant effect on the implementation of good governance.

Keywords: Good Governance, The Performance of Local Government Officials, Financial Management, SPIP

We have agree to be placed on the abstract sheet

Advisor,



Drs. Harun Delamat, M.Si., Ak
NIP: 195501131990031002

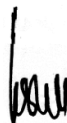
Palembang, October, 2018

Member,



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP: 196905251996032001

*Acknowledged by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP: 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

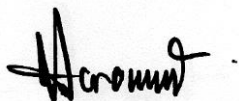
Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa Abstrak Skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa:

Nama : Desya Rahayu
NIM : 01031181419066
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : **Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Daerah (SPIP) terhadap Penerapan Good Governance. (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang)**

Telah kami periksa penulisan, *grammar* maupun susunan *tenses* nya, dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Pembimbing Skripsi

Ketua,



Drs. Harun Delamat, M.Si., Ak
NIP: 195501131990031002

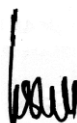
Anggota,



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP: 196905251996032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP: 197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Desya Rahayu

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 04/12/1996

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Perumnas Talang Kelapa, Perumahan Pondok Palem Indah Blok F2, No.6, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan.

Alamat Email : desyarahayu96@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD YWKA Palembang

SMP : SMP N 54 Palembang

SMA : MAN 3 Palembang

S-1 : Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Pengalaman Organisasi : 1. Purna Paskibraka Indonesia Kota Palembang
2. Yayasan Bujang Gadis Palembang
3. Ikatan Bujang Gadis Sumatera Selatan



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
SURAT PERNYATAAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 <i>Good Governance</i>	10
2.1.1.1 Definisi <i>Good Governance</i>	10
2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi <i>Good Governance</i>	11
2.1.1.3 Karakteristik <i>Good Governance</i>	12
2.1.2 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	14
2.1.2.1 Definisi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.....	14
2.1.2.2 Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	15
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	16
2.1.3.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah	16
2.1.3.2 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	17
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	19
2.1.4.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	19
2.1.4.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	23
2.4 Pengembangan Hipotesis	23
2.4.1 Hipotesis Hubungan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	23
2.4.2 Hipotesis Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap	

Penerapan <i>Good Governance</i>	27
2.4.3 Hipotesis Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	31
3.2 Rancangan Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.3.1 Jenis Data	32
3.3.2 Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Populasi dan Sampel Responden	33
3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	34
3.7 Uji Instrumen Penelitian	38
3.7.1 Uji Validitas	38
3.7.2 Uji Realibilitas	38
3.8 Data Uji Asumsi Klasik	39
3.8.1 Uji Normalitas Residual.....	39
3.8.2 Uji Multikolinearitas.....	39
3.8.3 Uji Heterokedastisitas	40
3.9 Teknik Analisis Regresi Linier Berganda	40
3.10 Pengujian Hipotesis	42
3.10.1 Uji Statistik T (Uji t)	42

3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1 Profil Singkat Kota Palembang.....	43
4.1.2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah	44
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Palembang	45
4.2 Deskripsi Profil Responden	47
4.2.1 Jenis Kelamin.....	47
4.2.2 Umur	47
4.2.3 Tingkat Pendidikan	48
4.2.4 Lama Bekerja Responden	49
4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	50
4.3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	50
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	56
4.4 Hasil Data Uji Asumsi Klasik.....	57
4.4.1 Hasil Uji Normalitas Residual	57
4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	58
4.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	59
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	60
4.6 Uji Hipotesis	63
4.6.1 Hasil Uji Statistik T (Uji t)	63
4.6.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66
4.7 Pembahasan	67

4.7.1 Pengaruh Kinerja Apartur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	67
4.7.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	69
4.7.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	73
5.3 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	21
3.1 Operasional Variabel.....	35
4.1 Deskripsi Jenis Kelamin Responden	47
4.2 Deskripsi Umur Responden	47
4.3 Deskripsi Tingkat Pendidikan Responden	48
4.4 Deskripsi Lama Bekerja Responden	49
4.5 Hasil Uji Validitas Good Governance (Y).....	50
4.6 Hasil Uji Validitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X1)	52
4.7 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	53
4.8 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	54
4.9 Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian.....	57
4.10 Hasil Uji Normalitas Residual	58
4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	59
4.12 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	61
4.13 Hasil Uji Statistik t (Uji t)	64
4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
4.1 Peta Kota Palembang	43
4.2 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	44
4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Kuisisioner Penelitian
2. Lampiran II Hasil Output (SPSS)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh persiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Menurut Salam (2004:19), Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Mardiasmo (2006:25) mengemukakan bahwa *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling

keterkaitan. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsi-prinsip *Good Governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bastian (2010) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Kinerja aparatur pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2006:27), paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi dibidang ini diperlukan, yaitu (1) pelimpahan

wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks, dan (2) tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahun tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2006:30). Dalam perkembangannya, era reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pemerintah daerah sekarang mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau urusan. Sebelum masa otonomi, aturan pemerintah daerah membuat laporan keuangan tidak seketat sekarang. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksa eksternal (BPK).

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara pemerintah

daerah dengan DPRD, maupun antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem pengendalian intern pemerintah juga merupakan sistem pengendalian yang harus diterapkan dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja pemerintah.

Tujuan dari pengendalian intern akan tercapai jika kelima elemen atau unsur sistem pengendalian intern pemerintah telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen atau unsur tersebut menurut PP No 60 tahun 2008 meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Aktivitas Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi

e. Pemantauan

Namun, meskipun begitu masih ada masalah birokrasi yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan *Good Governance*, yaitu belum melembaganya karakteristik *Good Governance* didalam pemerintahan daerah secara maksimal, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya.

Salah satu penyakit birokrasi yang terjadi di pemerintah daerah adalah pungutan liar yang lebih dikenal dengan istilah pungli. Lima belas tahun lebih reformasi sepertinya tidak mampu memberanguskan penyakit yang satu ini. Hal ini membuktikan bahwa paradigma pelayanan publik di era reformasi sekarang ini masih belum maksimal.

Kasus pungutan liar (pungli) yang baru-baru ini terungkap yaitu pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Sumatera Selatan. Hal itu berdasarkan data dari Ombudsman RI Perwakilan Sumsel di tahun 2017. Dari 185 laporan yang masuk, 14 di antaranya merupakan kasus pungli. Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Astra Gunawan mengungkapkan, pungli yang masuk tersebut rata-rata dalam mengurus data kependudukan. Kasus terbanyak berada di tingkat kecamatan di Kota Palembang.

Dia menambahkan, laporan yang masuk secara umum di tahun ini cenderung meningkat dibanding 2016 sebanyak 140 laporan. Terdiri dari 51 laporan terkait kinerja pemerintah daerah, 31 laporan berkenaan kepolisian, dan 18 laporan tentang kinerja Badan Pertanahan Nasional.

(Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/korban-enggan-lapor-kasus-pungli-e-ktp-di-sumsel-masih-tinggi.html>)

Kasus diatas penulis ambil sebagai contoh pelayanan aparatur pemerintah yang masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli). Hal tersebut merupakan indikator rendahnya kualitas kinerja aparatur pemerintah. Disini dapat dilihat bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah tidak akuntabel dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan karakteristik *Good Governance* yaitu bersifat akuntabilitas.

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan entitas Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang yang mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelas) pada tahun 2013. Alasan memberikan pendapat tersebut karena masih adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAK), serta adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan tersebut.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaporkan pemerintah daerah merupakan indikasi bahwa Laporan Keuangan yang dilaporkan oleh pihak Daerah sudah sangat memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. Namun apabila Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini berarti Laporan Keuangan yang disajikan dan dilaporkan oleh pihak Daerah tersebut masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga opini tersebut apabila terus menerus diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka hal tersebut merupakan indikasi adanya ketidaksesuaian dengan perundang-undangan, maka dapat mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, potensi kekurangan daerah, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan.

Penelitian ini belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* sejalan dengan penelitian terdahulu Tajuddin (2008) dalam implikasi *Good Governance* di Kabupaten Bangka ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* antara lain faktor manusia pelaksana yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah serta faktor organisasi dan manajemen.

Walaupun pada saat ini pemerintah telah menerapkan *Good Governance* pada pemerintah daerah, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan yang terdapat dalam tubuh pemerintahan daerah yang menyebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah dan tidak tercapainya tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini penulis beri judul **“Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan *Good Governance*. (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*?
3. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance*?

1.3. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui bagaimana pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap peranan *Good Governance*.
2. Dapat mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *Good Governance*.

3. Dapat mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan *Good Governance*.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran terutama yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *Good Governance* pada instansi pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi instansi yang diteliti, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau dapat memperluas literatur tentang pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan *Good Governance*, sehingga penerapan *Good Governance* dapat dilaksanakan dan dapat terwujudnya otonomi daerah yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, Rochman. 2009. *Good Governance: Manifesto Abad ke 21*. Jakarta: Kompas.
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE: Yogyakarta
- Dhiyavani, Siti Indah. 2017. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance*. (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru). JOM Fekon Vol. 4 No. 1, Februari 2017.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husen, Umar. 2005. *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakukaan*. Jakarta: Rajawali Pres
- Lembaga Administarsi Negara, 2008.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- _____. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Replublik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Qudratullah Muhammad. 2012. *Analisis Regresi Terapan: Teori, Contoh Kasus, dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ristanti, Ni Made Asih, Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Tabanan). *e-Journal Program Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 No. 1
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sarjono, Haryadi. 2011. *SPSS vs LISREL, Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Eka Nurmala. 2012. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya terhadap *Good Governance* (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di kota Medan). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 12, No. 2, September 2012
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) membangun manajemen kinerja guna meningkatkan produktifitas menuju good governance*. Bandung: Mandar Maju
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Magister Akuntansi*, Volume 5, No. 2: 103
- Suprayogi, Angga. 2010. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)*, Jurnal. Universitas Pasundan. Bandung.
- Tajuddin, K. A. 2008. *Good Governance (Konsep dan Implementasi di Kabupaten Bangka)*. Diakses 18 November 2017, 19.13 WIB. Dari: <http://www.bangka.go.id/>

Wibowo (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wirawan (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusniar, 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi*, Volume 5, No. 2, Mei 2016

Website:

www.palembang.go.id

www.jdih.palembang.go.id

www.wikiapbn.org

www.merdeka.com